



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANTRIONO JOKO SUSILO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 118248

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m²/120 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m²/44 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah Seluas 309 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m²/44 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 561 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
8. Tanah Seluas 596 m² di KAB / KOTA MAGETAN, WARISAN Rp. 110.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/156 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 202.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOBIL, HONDA JAZZ MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	692.150.614
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.902.267.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.218.417.614
III. HUTANG	Rp.	1.006.049.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.212.368.614

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.